**FILE BAB II**

**SERGIVIA DE JESUS REKO**

**172030076**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Literatur**

Literatur penelitian mengenai penerapan strategi *hybrid warfare* yang menjadi salah satu poin dalam strategi Rusia di Ukraina telah banyak dilakukan dan dipublikasikan ke dalam bentuk buku, jurnal hingga artikel ilmiah. Dari berbagai literatur yang ada, penulis menggunakan tiga literatur atau penelitian yang dinilai digunakan sebagai acuan dan pembanding pada penelitian ini antara lain:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Judul | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Stabilitas Keamanan Ukraina | Mochamad Reza Ananda (2019) | Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mebahas mengenai kebijakan yang dilakukan Rusia dan pengaruhnya terhadap ukraina | Skripsi ini berfokus pada bagaimana kebijakan politik luar negeri Rusia pasca berakhirnya perang dingin dengan menganalisa orientasi kebijakannya terhadap *near abroad* termasuk dalam hal ini stabilitas Ukraina.  |
| 2 | *Hybrid warfare and Russia’s Conflict Against the West* | Maj Joel Chartrand (2017) | Permasamaan dengan jurnal ini terdapat pada pembahasan yang berfokus pada strategi *hybrid warfare* yang dilakukan oleh Rusia. | Perbedaannya terletak pada bagaimana jurnal ini berorientasi pada konflik Rusia melawan blok Barat dengan menggunakan strategi *hybrid warfare*.  |
| 3 | Ancaman Strategi *Hybrid warfare* Rusia: Sebuah Persepsi Dan Manifestasi Kebijakan Estonia | Dyah Lupita Sari (2019) | Persamaan dengan tulisan ini terletak pada bagaimana Rusia menggunakan strategi *hybrid warfare* sebagai upaya ancaman kepada actor lain. | Perbedaannya terletak pada objek dari strategi Rusia itu sendiri yang mana pada tulisan ini menganalisa ancaman Rusia terhadap Estonia ditinjau dari perspektif Estonia.  |

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Stabilitas Keamanan Ukraina “yang ditulis oleh Moh Reza Ananda. Literatur ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan Rusia dan pengaruhnya terhadap ukraina. Rusia pasca perang dingin menjalankan beberapa kebijakan luar negeri yang cukup signifikan dan salah satunya adalah dengan mengancam Ukraina lewat intervensi dan aneksasi wilayah krimea.

Pada dasarnya, literatur ini sama-sama menjelaskan bagaimana kebijakan Rusia terhadap Ukraina namun, skripsi ini berfokus pada bagaimana kebijakan politik luar negeri Rusia pasca berakhirnya perang dingin dengan menganalisa orientasi kebijakannya terhadap *near abroad* termasuk dalam hal ini stabilitas keamanan Ukraina

Literatur kedua yaitu “*Hybrid warfare and Russia’s Conflict Against the West”*. Literatur ini membahas mengenai bagaimana Rusia memainkan peran dan posisinya dalam system internasional yang kala itu tidak hanya memicu konflik dengan negara sekitar namun juga dengan blok Barat.

Perbedaan anatara literatur terletak pada bagaimana jurnal ini berorientasi pada konflik Rusia melawan blok Barat dengan menggunakan strategi *hybrid warfare*.

Literatur ketiga yaitu “Ancaman Strategi *Hybrid warfare* Rusia: Sebuah Persepsi Dan Manifestasi Kebijakan Estonia”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Rusia sejatinya merupakan ancaman bagi Estonia yang mana persepsi ini dibangun lewat narasi sejarah tentang hubungan kedua negara ini sebelumnya. Adanya perbedaan pandangan mengenai kemerdekaan Rusia memiliki potensi untuk menaklukan kembali negara bekas Soviet.

Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian -penelitian sebelumnya, yang mana pada penelitian sebelumnya sama-sama membahas Rusia dan penerapan strategi *Hybrid warfare*, sejatinya skripsi yang coba penulis lakukan membahas dan menganalisa secara eksplisit bagaimana strategi *Hybrid warfare* Rusia tadi berpengaruh terhadap Ukraina dan menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

**2.2 Kerangka Teoritis**

2.2.1 Strategi *Hybrid warfare*

2.2.1.1 Defenisi Strategi *Hybrid warfare*

Strategi hybrid warfare merupakan sebuah trategi kombinasi dari dua bentuk ancaman konflik, yakni conventional warfare dan irregular warfare, yang mana di dalamnya melibatkan aktor negara dan non-negara diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bagian media informasi dan dalam hal ini tidak dibatasi oleh ruang (Jitka Richterova, 2015:4). Selain definisi di atas, strategi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah terminology, yang mana hal ini berarti suatu hal yang mampu melakukan taktik perang tradisional dan perang umum saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya (Lestari 2012).

Konsep perang hybrid dikemukakan pertama kali dalam tulisan William J. Nemeth pada tahun 2002 dengan judul “Future War and Cechnya: a Case for Hybrid Warfare”. Sejatinya walau konsep perang ini telah dikaji cukup lama selama kurang lebih dua decade, masih banyak ahli yang kesulitan dalam mempelajari konsep perang hybrid.

Pada tahun 2017, NATO dan EU menghadiri consensus yang disebut “The International Consensus on “Hybrid Warfare” dan dalam forum tersebut kedua Lembaga ini menyatakan bahwa tidak ada penjelasan pasti dari masing-masing pihak mengenai perang hybrid, walaupun pada dasarnya mereka berada pada posisi yang meyakini bahwa ini adalah sebuah ancaman. Perang hybrid dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai suatu penggunaan instrument-instrumen kekuatan secara sinkron untuk melakukan serangan terhadap suatu negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan strategisnya. John J. McCuen juga mengartikan perang hybrid sebagai suatu perang yang melibatkan keseluruhan spektrum, yang mana dari sisi fisik maupun konseptual, dalam rangka melakukan intervensi terhadap negara tertentu. Karakteristik perang hybrid adalah salah satunya yakni tidak melibatkan kekuatan dan pasukan militer secara langsung. Secara kompleks, strategi ini memainkan peran dengan melakukan serangan terhadap kerentanan suatu negara yang dieksploitasi melalui pengaruh politik, militer, ekonomi, sipil, dan informasi yang kemudian ditransformasikan menjadi kekuatan militer yang nyata. Aspek-aspek tadi juga digabungkan menjadi kekuatan yang dapat bergerak secara vertical dan horizontal, yang mana itu berarti setiap aspek tadi ditingkatkan pengaruhnya lewat penggabungan kekuatan lainnya.

Dalam beberapa konflik militer, seperti yang terjadi di Krimea pada tahun 2014, konsep perang hibrida sering digunakan untuk memperjelas dan mendefinisikan masalah yang dihadapi dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu konsep-konsep peperangan konvensional dan non-konvensional agar memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan konsep-konsep tersebut. Mengutip definisi NATO tentang perang konvensional, itu dapat didefinisikan sebagai metode dan taktik suatu negara menggunakan perang terbuka, dan harus mematuhi beberapa perjanjian internasional, konvensi internasional, dan hukum internasional. Pada saat yang sama, dalam definisi perang informal, konsep ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan metode perang tidak langsung melalui pengaruh aktor negara dan non-negara pada populasi sasaran.

2.2.1.2 Karakteristik Strategi *Hybrid warfare*

Berbagai metode peperangan, baik konvensional maupun non-konvensional, dapat digolongkan sebagai perang hibrida. Namun, yang unik dari perang hibrida adalah siklus fase strategis yang digunakan oleh para aktor. Dalam arti, penggunaan taktik perang hibrida tidak akan lepas dari serangkaian tahapan, yang selalu dimulai dengan taktik perang inkonvensional dan kemudian mengarah pada perang konvensional.

Berbagai metode, seperti kegiatan propaganda palsu, intelijen subversif, serangan siber, sabotase, dan dukungan politik untuk kelompok separatis sering digunakan untuk mendukung atau melengkapi taktik intrusi militer yang komprehensif (Navis, 2017). Dalam hal ini, konsep perang hibrida dapat dianggap kaku sehubungan dengan serangkaian fase yang tidak pernah berubah. Kemenangan dalam bentuk tidak teratur dalam konteks informasi, persepsi, interpretasi, dan pengambilan keputusan akan selalu berdampak signifikan di panggung reguler (Olson Ben, 2018:9).

Selain itu, ada beberapa elemen yang terlibat dalam konstruksi atau pengaruh tiga dimensi, yaitu diplomasi atau politik, media informasi, militer, ekonomi, keuangan, pengetahuan atau intelijen, dan hukum. Oleh karena itu, kombinasi ini diperlukan ketika menggunakan konsep ini untuk memenangkan pertempuran dalam dimensi fisik, psikologis, budaya, politik, dan manusia secara bersamaan.

Fokus pada perang hibrida tidak cukup untuk menggabungkan dua konsep yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, konsep ini akan dibahas secara lebih mendalam sehingga dapat dibedakan dengan peperangan konvensional dan nonkonvensional. Aspek kunci yang terkandung dalam konsep perang hibrida adalah ambiguitas terminologi, yang berarti sulitnya otoritas pemerintah untuk mengidentifikasi dan menemukan penyebab ancaman tersebut. 

Gambar 2.1. Kombinasi Aktor, Saluran dan Sarana Ancaman Hibrid

Dalam menyikapinya, atribusi adalah pemerintah yang terlebih dahulu perlu diklarifikasi dengan memahami aktor dan kepentingannya, namun tidak cukup dengan memahami aktor dan kepentingannya. Bentuk ancaman ini menjadi sulit karena bisa datang dari berbagai bentuk. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan pengaruh. Inilah yang disebut lingkungan informasi. Lingkungan informasi adalah model untuk memahami interaksi antara peserta yang tertarik dan audiens target, yang mengarah pada konstruksi melihat sesuatu (Anggara, 2014). Ruang konseptual ini terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu:

Tabel 2.1 Tiga Dimensi Ruang Konseptual Ancaman Hibrid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cognitive | Ruang disaat individu memahami sesuatu dan membuatKeputusan |
| 2 | Physical | Individu, organisasi, dan infrastruktur |
| 3 | Information | Fakta, pengetahuan, dan data |

Melalui sinergi ketiga dimensi tersebut diharapkan berdampak signifikan terhadap pembentukan persepsi, dukungan opini publik dan manipulasi proses pengambilan keputusan. Ketika orang-orang menyadari ancaman dari berbagai bentuk peperangan, tidak mengherankan untuk menggunakan bentuk ancaman ini sebagai salah satu agenda utama pertahanan NATO.

Hasil Welsh Summit yang diadakan di Lasconjarias pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ancaman perang hibrida telah menjadi tantangan yang harus dihadapi NATO dan sekutunya di era modern ini. Melihat kembali kesuksesan Rusia dalam konflik militer Krimea pada tahun 2014, isu ini tentu membuat dunia melihat bahaya dari ancaman ini. Strategi ini tidak hanya berfokus pada konflik militer di Krimea, tetapi juga berfokus pada perebutan pengaruh melalui media. Saat ini, beberapa negara Nordik sudah mulai memasuki tahap ancaman perang campuran. Hal ini terlihat pada persaingan pengaruh antara negara-negara pro-Barat dan pro-Rusia, yang telah menciptakan dualitas pandangan politik bagi masyarakat beberapa negara Nordik. Oleh karena itu, kombinasi potensi perang konvensional dan nonkonvensional sudah dapat digambarkan dengan terjadinya kasus Estonia, Latvia, Lithuania, Finlandia, dan Swedia sehingga mampu membentuk satu kesimpulan yang melihat situasi di wilayah Lautan Baltik sedang berada dalam kondisi *hybrid warfare*.

Hubungan antara kepentingan kebijakan luar negeri Rusia dan perusahaan media televisi berbahasa Rusia di kawasan Baltik, dan kehadiran media pro-Kremlin seperti Russian Times, Sputnik News, Finlandia dan radio LoveFM Swedia, telah memainkan peran penting dalam memenangkan opini publik. mendukung. Sebaliknya, tiga negara Baltik, Finlandia dan Swedia, bergabung dengan NATO dalam upaya membatasi perkembangan opini publik dalam mendukung kegiatan kebijakan luar negeri Rusia. Dalam hal ini, penerapan metode dukungan politik digunakan oleh kedua belah pihak untuk membangun opini publik. Dengan kata lain, opini publik menjadi target atau pengaruh yang diharapkan untuk membangun pengaruh atas tiga negara Baltik, Finlandia dan Swedia.

2.2.2 Realisme

Dalam buku Dasar-Dasar Hubungan Internasional menjelaskan bahwa Teori Realisme merupakan konsep *power* sebagai pusat dari semua perilaku bangsa-negara. Teori tersebut berasumsi bahwa negara-negara bertindak untuk memaksimalkan *power* mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan sendiri dengan lebih baik. Sebagaimana dikatan Hans Morgenthau (2010), petunjuk utama yang dapat membantu kita menjelaskan lanskap politik internasional adalah konsep “kepentingan nasional” dalam arti *power*.

Morgenthau juga mengatakan bahwa aspirasi manusia untuk mengejar power bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, bukan penyimpangan sementara dari kebebasan yang alami, melainkan sebuah fakta yang esensial dalam eksistensi manusia. Dia melihat bahwa politik adalah perebutan kekuasaan atas rakyat. Apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan yang paling penting. Sarana untuk memperoleh, mempertahankan, dan menunjukkan kekuasaan menentukan keterampilan tindakan politik.

Thucydides, Machiavelli, Hobbes, dan, tentu saja, semua realis klasik percaya bahwa tujuan kekuasaan, sarana kekuasaan, dan penggunaan kekuasaan adalah perhatian utama kegiatan politik. Oleh karena itu, politik internasional terutama digambarkan sebagai "politik kekuasaan", yang merupakan arena persaingan, konflik, dan perang antar negara. Masalah dasar dalam membela kepentingan nasional dan memastikan kelangsungan hidup nasional adalah sama. Basis normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup nasional. Inilah nilai-nilai yang mengedepankan realisme dan realisme politik luar negeri. Negara dipandang sebagai kondisi yang diperlukan untuk memastikan bahwa warganya menjalani kehidupan yang baik.

Negara yang menjamin keamanan serta alat dan kondisi kehidupan manusia, dalam kata terkenal Johnston (2020) Thomas Hobbes (1946: 82) “kesepian, kemiskinan adalah hal yang sangat tidak menyenangkan, tidak manusiawi dan terbatas”. Oleh karena itu, negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan kehidupan warga negara yang terjamin dan berharga. Kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan politik luar negeri. Morgenthau percaya bahwa "politik adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang-orang, dan tidak peduli apa tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan yang paling penting, dan sarana yang diperoleh, dipertahankan dan ditampilkan menentukan keterampilan tindakan politik". Morgenthau berbagi dengan Machiavelli dan Hobbes bahwa orang harus memobilisasi dan menyebarkan kekuatan mereka jika mereka ingin memperoleh wilayah politik yang bebas dari campur tangan atau kendali asing.

2.2.3 Perkembangan Strategi Perang

Strategi merupakan sebuah perencanaan rasional demi mewujudkan tujuan yang ada. Lalu, Perang merupakan sebuah strategi yang terpisah dari persaingan politik, ekonomi dan militer. Clausewitz (1976) dalam Paret (2007) mengatakan bahwa, “Tidak seorang pun memulai perang atau lebih tepatnya, tidak ada satu indera untuk melakukannya tanpa terlebih dahulu jelas dalam pikirannya apa yang ia ingin capai dengan perang itu dan bagaimana ia melakukannya (Widjajanto et.al, 2013). Sehingga dapat dikatakan bahwa perang membutuhkan sebuah strategi rasional agar dapat sukses mencapai tujuan politiknya. Berdasarkan hal tersebut diketahui perang telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan dalam setiap era. Dahulu perang dilakukan dengan memanfaatkan taktik dan siasat yang masih bersifat konvensional namun ekarang perang telah mengalami begitu banyak evolusi perkembangan sesuai dengan tujuan politik serta kebutuhan negara yang mengembangkannya secara signifikan diantarannya berikut dijabarkan macam model perang seiring dengan perkembangannya antara lain:

2.2.3.1 Perang Konvensional

Perang konvensional hanyalah perang militer. Eksploitasi militer terhadap kelemahan musuh harus dimulai dengan pemahaman konsep kemampuan militer itu sendiri. Konsep kapabilitas militer Kementerian Pertahanan Inggris seperti yang dijelaskan oleh Yue dan Henshaw (2009) dapat dikatakan cukup komprehensif, karena merinci semua elemen kekuatan yang membentuk kapabilitas militer. Secara kolektif dikenal sebagai Developmental Line of Defense (DLOD), elemen kekuatan ini terdiri dari elemen-elemen berikut: pelatihan, peralatan, personel, informasi, doktrin, organisasi, interoperabilitas, logistik, dan infrastruktur, disingkat TEPDIOLI.

Untuk memudahkan pemahaman, Rahmadi dan Young (2018) menjelaskan bahwa kemampuan militer terutama ditentukan oleh sumber daya manusianya, yaitu tentara. Hanya dengan pelatihan yang memadai seorang pejuang yang kuat dan kuat dapat diciptakan. Seluruh anggota prajurit tersebut wajib dibawah naungan organisasi yang baik dan disertai dengan infrastruktur yang baik juga seperti markas tempat latihan, juga peralatan logistic.

Pengertian lainnya peperangan konvensional juga dapat diatikan sebagai salah satu bentuk peperangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata konvensional dan taktik medan perang antara dua negara atau lebih dalam konfrontasi terbuka. Kekuatan di setiap sisi didefinisikan dengan baik, dan bertarung menggunakan senjata yang terutama menargetkan militer lawan. Biasanya perang ini menggunakan senjata konvensional, dan bukan dengan senjata teknologis, kimia, biologi, atau nuklir.

Tujuan umum dari peperangan konvensional adalah untuk melemahkan atau menghancurkan militer lawan, dengan demikian meniadakan kemampuannya untuk terlibat dalam peperangan konvensional. Namun, dalam memaksakan kapitulasi satu atau kedua belah pihak pada akhirnya dapat menggunakan taktik perang yang tidak konvensional.

2.2.3.2 Perang Modern

Peperangan modern adalah perang yang sangat kontras dengan konsep, metode, dan teknologi militer sebelumnya yang menekankan pada isu kombatan harus dimodernisasi untuk mempertahankan nilai tempurnya (Anwar, 2018). Oleh karena itu, ini adalah subjek yang berkembang dengan pandangan yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Sebenarnya, itu hanya identik dengan perang kontemporer.

Dalam arti luas, ini mencakup semua perang sejak "Revolusi Bubuk Mesiu" yang menandai awal perang modern awal, tetapi perkembangan militer penting lainnya telah digunakan untuk menggantikannya, termasuk yang ditandai oleh Perang Krimea. tentara melawan kereta api dimulai pada Perang Saudara Amerika, peluncuran pertama Dreadnought pada tahun 1905 atau penggunaan senapan mesin, pesawat, tank atau radio dalam Perang Dunia I.

Dewasa ini, perang memiliki pergeseran makna dan perkembang elemen- elemen yang mempengaruhi bagaimana kontemplasi militer di bidang peperangan dan seperti apa konstelasi negara dalam menavigasi perang kontemporer saat ini. Faktor utama yang mendorong penyimpangan arah dari perang adalah globalisasi yang mampu mentransformasi kemajuan senjata militer yang canggih dan mematikan, yang lalu digunakan untuk mendukung aksi-aksi pemberontakan warga sipil melalui pendanaan asing maupun diaspora yang menyebar (Beta, 2018).

Kestabilan dan struktur sosial merupakan target utama dalam perang kontemporer ini misalnya berupa genosida etnis, perdagangan manusia secara ilegal, memporak-porandakan pengungsi. Sehingga kondisi ini kerap kali disebut invisible conflict. Pendapat Clausewitz lalu akhirnya lebih kompatibel diterapkan dalam proporsi perang kontemporer dimana terdapat konsep trinitas antara negara, tentara dan publik sebagai entitas utama dalam perang karena menggambarkan perbedaan utama dari modernitas berupa publik dan swasta, ekonomi dan politik, internal dan eksternal, sipil dan militer serta kombatan dan nonkombatan (Clausewitz, 1993: 90-93).

Kemudian terdapat pemaparan tentang perbedaan perang konvensional dengan perang kontemporer. Yang pertama dari segi aktor, dimana pada perang konvensional hanya aktor militer yang mendapat mandat penuh untuk terlibat perang, sedangkan pada peperangan kontemporer aktor yang turut berperang secara holistic bekerja sama untuk memenuhi kepentingan bersama diantaranya meliputi jaringan state maupun nonstates actors, yakni angkatan persenjataan reguler, para kontraktor keamanan swasta, tentara bayaran, jihadis, panglima perang dan sebagainya (Kaldor, 2013).

Kemudian perubahan yang kedua terletak pada segi tujuan pepeperangan. Perang konvensional hanya berhenti pada tujuan keuntungan geopolitik, penguasa kawasan ataupun ekspansi ideologi dalam bentuk doktrinasi layaknya yang dilakukan Adolf Hitler dengan Nazi Jerman. Sedangkan perang kontemporer lebih berkutat pada upaya pencapaian eksistensi melalui identitas berupa etnis, agama ataupun suku yang bertujuan untuk mendapatkan akses strategis akses ke negara untuk kelompok-kelompok tertentu (lokal maupun transnasional).

Perbedaan yang ketiga menekankan pada segi metode, dimana perang konvensional berkaitan dengan agresi nyata dalam upaya memperebutkan teritori melalui manuver-manuver militer. Sementara perang kontemporer lebih kepada pertemburan yang intangible berupa negosiasi dengan cara-cara politik dalam pengontrolan populasi dan power yang ada.

Faktor yang keempat adalah dari bidang pendanaan, dimana negara melalui pajak ataupun negara patron merupakan penyokong utama dalam perang konvensional. Sedangkan perang kontemporer cenderung mendapatkan dana dari berbagai sumber sebagai aktor yang berkepentingan terhadap keberlangsungan kekerasan tersebut, misalnya jaringan mafia ataupun perusahaan multinasional yang berkepentingan. Dan faktor yang kelima adalah medan perang yang berkembang menjadi perang dalam lingkup bukan hanya daratan, melainkan juga laut dan udara.

2.2.4 Taktik Defensif dan Ofensif

Definisi suku kata defensif lebih berkaitan dengan menunjukkan sikap defensif atau bertahan dan pertahanan. Sementara penyerangan adalah kebalikan dari pertahanan, itu adalah keadaan menunjukkan penyerangan.

Sebagai contoh time lag yang dialami oleh seorang penyerang, ia akan berusaha mengejar waktu yang hilang. Penahanan dan penarikan bertahap adalah tujuan utama di lokasi serangan. Ini memberinya cukup waktu dan ruang untuk memobilisasi dan mengatur kekuatan yang cukup kuat untuk menyerang balik sebagai pembalasan. Oleh karena itu, sebelum ia mencapai waktu dan ruang yang cukup untuk membalas, penyerang akan melakukan tindakan, juga dikenal sebagai taktik bertahan, atau pertahanan diri, dengan menghindari waktu dan tempat serangan musuh, penyerang harus menggunakan kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan. menyerang. Kalahkan musuh. Beralih ke tindakan ofensif, menyerang.

Pembelaan diri harus meniadakan ancaman dan serangan, jadi musuh harus diarahkan sebelum ancaman dan serangan ditawarkan. Demokrasi umumnya terpaksa menyerang karena dia diserang lebih dulu. Jika negara yang diserang memiliki kekuatan yang sama dengan agresor, negara yang diserang akan bertindak defensif karena dapat menahan diri dalam perang biasa. Hanya dengan menyerang kita bisa mengalahkan musuh.

Napoleon berkata: Jangan bersikap defensif kecuali tidak ada cara lain. Jika Anda harus menempuh rute ini, maka Anda harus benar-benar sadar bahwa itu hanya untuk memiliki waktu untuk memusatkan cadangan dan mengalihkan musuh dari basis operasinya dengan tujuan untuk dapat melakukannya di beberapa titik. Serang dia tepat waktu. Hanya offensif yang bisa mengalahkan musuh, dan pertahanan tidak bisa mengalahkan musuh. Namun, pertahanan hanya bersiap dan menunggu kapan harus menyerang.

Prajurit gerilya tidak hanya prajurit yang membawa senjata yang biasa digunakan dalam perang biasa, tetapi juga prajurit yang membawa ideologi, bukan hanya sebagai garda depan pertempuran, tetapi juga pelopor ideologi. Oleh karena itu, hanya ideologi yang kuat, hanya kemauan yang kuat, yang dapat meledakkan perang gerilya, dengan teguh melintasi jalan penderitaan yang panjang dan sulit, hingga mengalahkan musuh yang kuat. Memobilisasi tentara untuk menumpas musuh yang mengamuk hanya dapat dilawan secara efektif melalui cara dan kekuatan gerilya. Dengan bantuan semangat rakyat jujur, para gerilyawan dapat mengimbangi kekuatan musuh yang besar dan terorganisir dengan baik. Api semangat juang yang berkobar di dalam hati memberikan kekuatan untuk menahan segala kejutan dan ujian berat, sehingga para prajurit gerilya bukan hanya prajurit biasa, melainkan pionir.

Terkait dengan masalah ini, secara umum diterima bahwa ada tiga gagasan utama dari strategi perang hibrida itu sendiri yang dapat menjadi dasar untuk menerapkan strategi ini. Implementasi Rusia dari Perang Informasi Pandangan kedua menyangkut aspek-aspek defensif dari strategi perang informasi Rusia. Dibandingkan dengan dua kelompok ini, kelompok ketiga melihat bagaimana Rusia melakukan perang informasi defensif dan ofensif. Doktrin Gerasimov umumnya digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan, namun masih terdapat celah yang perlu dijelaskan mengapa fenomena ini dapat terjadi. Maka dari itu, peneliti secara lebih spesifik akan menjelaskan tentang alasan mengapa bagi Rusia untuk melakukan strategi ofensif dan defensif tersebut.

2.2.5 Strategi *Deterrence*

Untuk dapat melihat upaya pencegahan serangan teror khususnya pada Ukraina, maka strategi yang perlu atau harus untuk mulai dirancang dan dikembangkan dapat disebut juga sebagai strategi penggentaran (*deterrence*). Strategi *deterrence* ini dipilih karena dianggap sebagai strategi yang komprehensif yang paling mampu mencakup upaya penanggulangan serangan offensive dari pihak lawan atau musuh (hard approach dan soft approach).

Menurut Vinjamuri (2015), terdapat dua jenis strategi penggentaran yang dapat digunakan untuk merespon serangan dari negara lain atau mengatasi konflik dari terorisme yaitu penggentaran dengan hukuman (*deterrence* by punishment) dan penggentaran dengan penangkalan (*deterrence* by denial). Penggentaran dengan hukuman menekankan pada pemberian sanksi hukuman apabila serangan tetap dilakukan, sedangkan penggentaran dengan penangkalan menekankan pada ancaman kegagalan apabila serangan dilakukan. Penerapan strategi penggentaran dengan penangkalan akan menjadi fokus dalam penelitian ini dimana akan diberikan usulan usulan model strategi *deterrence* yang seharusnya digunakan dan dimanfaatkan oleh Ukraina dalam mengatasi konflik yang mungin dapat terjadi di masa depan. Alasan utama dari fokus terhadap penerapan strategi penangkalan adalah karena upaya penangkalan dapat diterapkan berbeda-beda di setiap wilayah Ukraina tergantung dengan besarnya potensi lokasi-lokasi yang dapat dijadikan target serangan teror.

Menurut definisnya, strategi penggentaran (*deterrence*) dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah pihak musuh untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dapat merugikan kita (Rid, 2012). Dalam konteks terorisme, strategi penggentaran dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah kelompok teroris untuk melakukan serangan teror. Selain itu, strategi ini juga mencakup pula langkah-langkah untuk meringankan dan mengelola dampak serangan ofensif negara lain serta mempercepat pemulihan pasca-serangan guna menghilangkan efek serangan tersebut.

Yang juga tidak kalah pentingnya dalam pendekatan ini adalah membangun ketahanan masyarakat terhadap serangan teroris. Ketahanan masyarakat terhadap serangan teroris mengirimkan pesan bahwa taktik ini tidak dapat mengantarkan teroris ke tujuan akhir. Dengan kata lain, teroris dapat dicegah dari melakukan serangan dengan meningkatkan ekspektasi akan kegagalan strategis (strategic failure) dari penggunaan strategi teror untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka (Gray, 2003 dalam Sulistyo, 2015).

Wilner (2014) juga mengemukakan hal yang hampir serupa. Menurut mereka, upaya penggentaran melalui penangkalan dapat dilakukan dengan menghilangkan peluang, menghilangkan kapabilitas, dan menghilangkan motivasi atau tujuan kelompok teroris. Penangkalan di level ini adalah yang paling penting, tapi juga paling sulit untuk dilakukan.

Selain penggentaran dengan penangkalan, terdapat juga upaya penggentaran melalui hukuman. Menurut definisinya. Penggentaran dengan hukuman dapat diartikan sebagai ancaman kepada pihak musuh terhadap sesuatu yang bernialai yang dimiliki apabila ia tetap melakukan apa yang tidak kita inginkan. Hukuman yang diancamkan kepada pihak musuh tidak terbatas pada serangan teroris itu sendiri, tetapi juga langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dipercaya akan mendahului serangan oleh Trager, dan Zagorcheva, 2005 dalam Miller (2013).

Dalam perkembangannya, penggentaran dengan hukuman masih mengalami banyak perdebatan, terutama pada penerapan retaliasi masif pada era Perang Dingin dan hukuman kolektif yang menargetkan keluarga atau komunitas yang mendukungnya. Dengan kata lain, teroris harus diyakinkan bahwa pemerintah “bersedia menempuh seluruh cara” untuk menghukum teroris, tidak hanya yang melakukan serangan, tetapi juga kepada keluarga dan komunitas pendukungnya.

Oleh sebab itu, penggunaan strategi penggentaran dalam menanggulangi krisis ataupun konflik pada Ukraina ataupu negara-lainnya menjadi upaya yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan negara lain merupakan suatu yang relevan untuk digunakan. Pada penelitian ini, penggunaan strategi penggentaran dengan penangkalan akan menjadi fokus utama dalam melihat upaya pencegahan serangan yang kemungkinan dapat tenjadi pada masa-masa yang akan datang.

**2.3 Hipotesis**

Karena adanya aneksasi Krimea oleh Rusia melalui strategi Hybrid Warfare, maka Ukraina melakukan strategi Detterence sebagai respon terhadap Rusia.

**2.4 Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Karena adanya aneksasi Krimea oleh Rusia melalui strategi Hybrid Warfare | 1. *Hybrid warfare* merupakan strategi yang diterapkan oleh Rusia dalam meganeksasi wilayah Krimea dalam konflik Ukraina tahun 2014.
 | 1. Rusia telah memandang bahwa penerapan strategi *hybrid warfare* merupakan bagian dari upaya *deterrence* mereka dalam kebijakan keamanan dan pertahanan Rusia.
 |
| Variabel terikat: maka Ukraina melakukan strategi Detterence sebagai respon terhadap Rusia. | Terjadi konflik berkelanjutan yang ditandai dengan adanya krisis besar-besaran di Ukraina yang membuat Ukraina harus merespon dengan salah satu alternative strategi adalah Detterence. | * 1. Upaya Deterrence Ukraina dalam Menghilangkan Peluang Serangan Teror Negara Ancaman. Dari penjelasan sebelumnya, bagian ini memaparkan mengenai penerapan strategi penggentaran dengan penangkalan yang bertujuan untuk mencegah serangan teror dengan menghilangkan peluang yang dimiliki kelompok teroris. Untuk menganalisa upaya menghilangkan peluang dari kelompok teroris dalam melakukan serangan teror terdapat beberapa faktor penting, diantaranya adalah efektifitas dari pasukan intelejen yang dimiliki, pengamanan terhadap objek-objek yang dianggap vital, dan pengamanan terhadap infrastruktur kritis yang ada di Ukraina.
	2. Upaya Deterrence Ukraina dalam Menghilangkan Kapabilitas Kelompok Negara Ancaman. Selain melakukan upaya menghilangkan peluang kelompok negara ancaman dalam melakukan serangan, Pemerintah Ukraina juga berupaya untuk menghilangkan kapabilitas dari kelompok negara terkait. Dalam melakukan upaya ini terdapat beberapa hal penting yang menjadi fokus untuk dapat meningkatkan keberhasilan yang ingin dicapai.
 |

**2.5 Skema Dan Alur Pemikiran**

Rusia

Upaya aneksasi Krimea

Ukraina mengalami krisis

Strategi *Hybrid warfare*

****

Strategi Detterence Ukraina

* Krisis ekonomi
* Krisis politik
* Krisis Kemanusiaan
* Krisis imigrasi
* Krisis Global